

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan. Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4).

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu diadakan analisis terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Salah satu cara yang dilakukan dengan analisis keuangan. Menurut Zuhri (2016), analisis laporan keuangan

merupakan analisis dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah sangat penting untuk menilai Akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis laporan keuangan pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan pada suatu daerah sangatlah penting untuk diteliti dan kerugian jika tidak meneliti kinerja keuangan tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan ekonomi dan pencapaian perencanaan yang telah direncanakan di daerah tersebut, yang perencanaan tersebut menyangkut dengan kegiatan usaha pada suatu daerah, apakah daerah tersebut mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan daerah seperti Rasio Derajat Desentralisasi yang mengukur kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mengukur kemandirian keuangan pada suatu daerah, Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pada suatu daerah dan Rasio Keserasian Menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal (Rahmayanti, 2016).

Pentingnya penelitian kinerja keuangan agar dapat mengetahui hasil kerja di bidang keuangan pada suatu daerah yang mencakup pendapatan dan

juga pengeluaran pada suatu daerah, yang telah ditetapkan oleh undang-undang selama satu periode dan yang nanti akan dibandingkan anggaran yang sebelumnya dan anggaran sesudahnya.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Pramono, 2014).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan/ penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba, lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan total penerimaan daerah dimana pendapatan tersebut berasal dari anggaran-anggaran yang disalurkan dari pemerintah pusat dan lain-lain, baik berupa bantuan, subsidi ataupun pinjaman.

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan pada salah satu provinsi yang memiliki PAD yang besar, yakni Provinsi Jawa Barat dan dimana Provinsi tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar ke-2 setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, yang mana sumber pendapatannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan

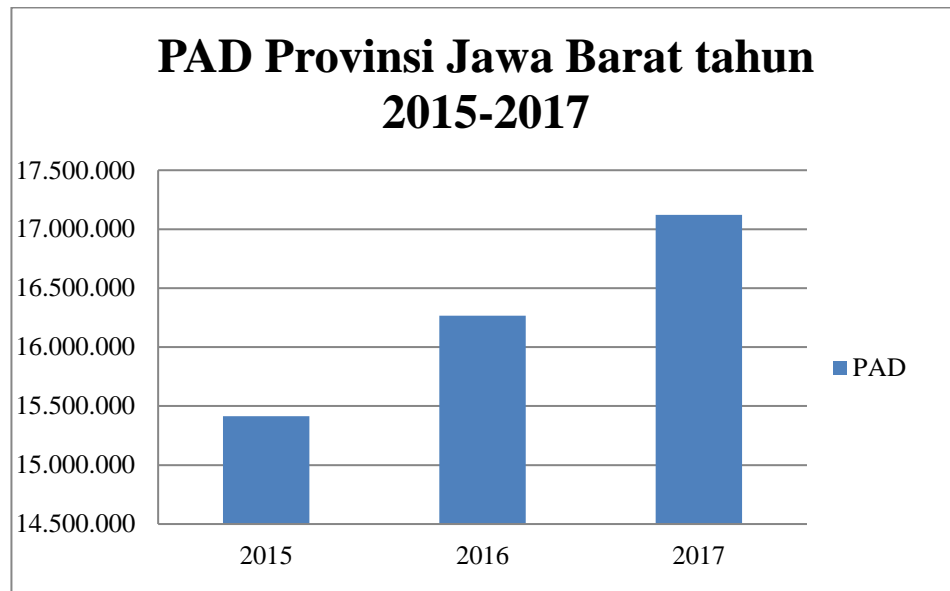
dengan hal tersebut akan ditampilkan data-data mengenai sumber PAD Provinsi Jawa Barat dalam periode 2015-2017 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Sumber PAD Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2015	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.415.140.938.718,00
	Pendapatan Pajak Daerah	14.276.480.327.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	59.015.099.855,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	278.599.785.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	800.945.726.863,00
2016	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.266.921.956.010,00
	Pendapatan Pajak Daerah	15.013.481.105.821,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	69.945.837.950,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	334.053.250.208,00
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	848.871.792.031,00
2017	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.121.067.343.303,00
	Pendapatan Pajak Daerah	15.626.632.284.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	60.017.945.501,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	359.866.552.681,00
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	1.074.550.561.121,00

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia (Diolah).

Data-data yang terdapat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada setiap komponen sumber PAD Provinsi Jawa Barat dalam periode 2015-2017, yang mana hal tersebut berdampak pada terjadinya peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Grafik 1.1. di bawah ini akan menunjukkan adanya peningkatan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat pada periode 2015-2017.



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia.

Grafik 1.1. PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Dari grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2017 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PAD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.15.415.140, yang mengalami peningkatan menjadi Rp.16.266.951 pada tahun 2016. Atau dengan peningkatan persentase sebesar 5.53%. PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 pun mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.121.167, dengan persentase peningkatan sebesar 5.25%. Sehingga dapat terlihat bahwa adanya peningkatan PAD dari dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat ditekankan telah cukup baik, yang dapat berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karenanya, mengetahui gambaran kinerja keuangan pada suatu daerah sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui dan melihat tingkat perkembangan dan kemajuan perekonomian pada suatu daerah, yang diperoleh

dan diketahui dari laporan tahun sebelumnya. Gambaran kinerja keuangan juga berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana peningkatan Kinerja keuangan pada kabupaten dan kota di Jawa Barat apabila data keuangan tersebut di publikasikan agar masyarakat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan perkembangan kinerja keuangan di kabupaten dan kota Jawa Barat. Dan manfaat gambaran kinerja keuangan untuk suatu perusahaan adalah dimana perusahaan dapat melihat gambaran keadaan keuangan perusahaan dan dapat melihat sejauh mana peluang perusahaan tersebut dalam bekerja sama dengan suatu daerah tertentu (Mardiasmo, 2013).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dimana hasil penelitian Mosses, Iis (2017) menemukan Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Sumedang dilihat dari perhitungan menunjukkan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal kurang kriteria, dengan perhitungan rata-rata 12% dari anggaran lima tahun. Rasio Kemandirian Keuangan Regional menunjukkan hubungan instruktif. Rasio pertumbuhan menunjukkan fluktuasi. Rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan kriteria PAD sangat efektif dan sangat efisien. Rasio likuiditas terhadap rasio lancar adalah 2,87 sedangkan rasio lancar menunjukkan 2,59. Dan Rasio Perputaran Aset menunjukkan angka 10%. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Sumedang adalah PAD dan Aset sedangkan Transfer memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dengan kontribusi pengaruh 100%. Pemerintah Sumedang telah

melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui sosialisasi, program Zona Nilai Tanah, pengumpulan data berulang, dan intensifikasi atau ekstensifikasi pajak daerah

Muhammad wahyudi, Wulandari (2017) menyatakan bahwa kinerja dan kemampuan pemerintah kota Magelang dengan rasio keuangan dan analisis Share and Growth. Data yang digunakan berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum konsisten, dimana mengalami *trend positif* dan *trend negatif*. Kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang.

Pauwah (2014) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. Analisis rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten kepulauan Sula dapat dikategorikan cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif, artinya kemampuan Pemda dalam meningkatkan pertumbuhan PAD perlu diperbaiki dan tingkatkan. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang belanja pegawai yang memiliki nilai yang masih cukup besar jika dibanding dengan nilai PAD.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu bahwa pengelolaan kinerja keuangan masih belum konsisten, dikarenakan pada tingkat Derajat

Desentralisasi fiskal masih kurang, pada tingkat kemandirian instruktif yang dimana tingkat kemandirian tersebut masih sangat rendah sekali tingkat kemandirian pemerintah daerah dibandingkan peranan pemerintah pusat, dan pada tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola dana sudah sangat baik, sedangkan untuk Pertumbuhan PAD cukup tinggi dan Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi. Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan perbandingan penerimaan hasil daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio ini dapat diukur dengan membagi nilai total penerimaan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD.

Ditinjau dari sudut pandang Islam kinerja merupakan salah satu sarana hidup dan aktivitas yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial. Menurut ajaran Islam, setiap orang dituntut untuk mandiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya ia wajib bekerja dan tidak diperbolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan kata lain, Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan dalam hal ini, dapat diukur dengan beberapa rasio seperti Rasio Derajat Desentralisasi. Menurut sudut pandang islam Rasio Derajat Desentralisasi

adalah wewenang dan tanggung jawab yang sangat diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Dalam sudut pandang islam, Rasio Derajat Desentralisasi sama halnya seperti Rasio keserasian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawab.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini, menurut sudut pandang islam, semua rasio tersebut mempengaruhi kinerja keuangan yang berarti kemenangan, keberhasilan, kesuksesan atau efektif, yang berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan secara baik sesuai syariat Islam.

Dari adanya beberapa perbedaan penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali untuk mengukur kinerja keuangan pendapatan asli daerah dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2015-2017 Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang diukur dengan Rasio Desentralisasi pada tahun 2015-2017.
- b. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang diukur dengan Rasio Kemandirian pada tahun 2015-2017.
- c. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang diukur dengan Rasio efektivitas pada tahun 2015-2017.
- d. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang diukur dengan Rasio Efisiensi pada tahun 2015-2017.
- e. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang diukur dengan Rasio Keserasian Keuangan Daerah pada tahun 2015-2017.
- f. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa barat yang dilihat dari sudut pandang Islam pada tahun 2015-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

- a. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
- b. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat dilihat dari Rasio Kemandirian

- c. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
- d. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
- e. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dilihat dari Rasio Keserasian.
- f. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dilihat dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat dengan menerapkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian/Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi instansi pemerintahan daerah didalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan dan dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi di dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

1.4.2 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan dapat juga digunakan sebagai referensi yang akan berguna terutama dalam penelitian di masa yang akan datang

1.4.3 Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian dengan menganalisis laporan keuangan terhadap laporan realisasi anggaran (LRA) untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat.